

# LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK



Kontribusi dan Keterkaitan Sektor Ekonomi Kelautan  
Terhadap Pembangunan Kawasan Antarwilayah Selat Makassar Indonesia

**Ketua Peneliti: Auliansyah, S.Kel.,M.Si**

**Anggota Peneliti:**

1. Dr. Iwan Gani, SE.,M.Si
2. Dr. Emmilya Umma Aziza Gaffar, SE.,M.Si

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
PROGRAM STUDI SI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Dibiayai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Kontrak Penelitian  
Nomot: /UN17.1/ /2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Penelitian : Kontribusi dan Keterkaitan Sektor Ekonomi Kelautan Terhadap Pembangunan Kawasan Antarwilayah Selat Makassar

Pelaksana Kegiatan

Ketua Peneliti : Auliansyah, S.Kel.,M.Si  
 NIDN : 0011118907  
 Golongan : -  
 Jabatan Fungsional : -  
 Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Nilai Insentif Penelitian : Rp 20.000.000,-  
 Sumber Anggaran : DIPA FEB Universitas Mulawarman T.A. 2021

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. H. Adi Wijaya, SE, M.Si  
 NIP. 19600606 198803 1 001

Samarinda, 8 November 2021


Ketua Peneliti



Auliansyah, S.Kel.,M.Si  
 NIDN. 0011118907

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si  
 NIP. 19620513 198811 2 001

**Abstrak:** Selat Makassar merupakan penghubung antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Melalui Peraturan Presiden, kawasan ini telah ditetapkan menjadi zonasi kawasan antarwilayah Selat Makassar yang mencakup lima provinsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sektor kunci ekonomi kelautan setiap provinsi dan menganalisis keterkaitan setiap sektor antar provinsi dalam kawasan. Data yang digunakan adalah data Inter Regional Input Output (IRIO) tahun 2016 update Januari 2021 dan dianalisis menggunakan model IRIO. Berdasarkan hasil analisis, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 sektor kunci, Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah masing-masing 2 sektor kunci dan Sulawesi Barat 1 sektor. Meskipun Kalimantan Timur memiliki sektor kunci paling dominan dan outputnya digunakan sebagai input di provinsi lain, akan tetapi pada sisi permintaan akhir barang atau jasa, nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor apa yang menjadi sektor kunci dan bagaimana setiap sektor antar provinsi saling terkait? pertanyaan tersebut telah dijelaskan dalam hasil penelitian ini.

**Abstract:** Makassar Strait is the link between the island of Kalimantan and the island of Sulawesi. Through a Presidential Regulation, this area has been designated as an interregional zoning of the Makassar Strait which includes five provinces. The purpose of this study is to analyze the key sectors of the marine economy of each province and to analyze the interrelationships of each sector between provinces within the region. The data used is the 2016 Inter Regional Input Output (IRIO) data updated in January 2021 and analyzed using the IRIO model. Based on the results of the analysis, East Kalimantan Province has 6 key sectors, South Kalimantan, South Sulawesi, and Central Sulawesi Provinces each have 2 key sectors and West Sulawesi 1 sector. Although East Kalimantan has the most dominant key sector and its output is used as input in other provinces, however, on the final demand side of goods or services, the value is lower than that of South Sulawesi Province. What sectors are the key sectors and how are each sector inter-provincial interrelated? These questions have been explained in the results of this study.

Saat ini pada kawasan antarwilayah Selat Makassar, setiap provinsi telah selesai menyusun peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), rencana zonasi merupakan implementasi ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan daerah ini mengatur wilayah laut hingga radius 12 Mil dan berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun, peninjauan dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Secara umum, pada setiap RZWP3K memiliki 3 alokasi ruang yaitu: 1) kawasan pemanfaatan umum, 2) kawasan konservasi, dan 3) alur laut. Kawasan pemanfaatan umum mencakup aktifitas perikanan tangkap, budidaya, pertambangan, pariwisata. Kawasan konservasi mencakup kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang didalamnya mencakup upaya perlindungan ekosistem laut, bioata, mamalia, arkeologi maritim/kapal tenggelam. Alur laut mencakup, alur pelayaran masyarakat, alur pelayaran kargo, pipa bawah laut, kabel bawah laut, dan alur ruaya organisme laut.

## **6. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

### **6.1 Kesimpulan**

Penggunaan data dan model analisis Inter Regional Input Output telah berhasil memberi gambar dan mengidentifikasi sektor-sektor kunci ekonomi kelautan pada setiap provinsi. Berdasarkan hasil analisis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan subsektor kunci atau unggulan lebih banyak jika dibandingkan dengan 4 provinsi lain, sektor kunci ekonomi kelautan Provinsi Kalimantan Timur adalah subsektor pertambangan batu baru dan lignit, industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, kontruksi, perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, dan jasa perusahaan. Masing-masing dua sub sektor kunci adalah Provinsi Kalimantan Selatan (industri makanan dan minuman, dan kontruksi), Sulawesi Selatan (industri makanan dan minuman, dan industri barang galian bukan logam), Sulawesi Tengah (industri makanan dan minuman, dan konstruksi), dan Sulawesi Barat satu sektor kunci yaitu industri makanan dan minuman.

Total nilai permintaan akhir produk barang dan jasa sektor ekonomi kelautan dalam kawasan mencapai Rp. 461 Triliun, secara berturut-turut nilai tersebut dikontribusikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan 45%, Kalimantan Timur 30%, Kalimantan Selatan 14%, Sulawesi Tengah 9%, dan Sulawesi Barat 3%. Hampir semua subsektor pada setiap provinsi saling memiliki keterkaitan, artinya output subsektor digunakan sebagai input pada subsektor ekonomi kelautan antar provinsi dalam kawasan.

## 6.2 Rekomendasi Kebijakan

Keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur akan memberi dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kawasanantarwilayah Selat Makassar. Daya serap Output pada setiap sektor dan subsektor ekonomi kelautan pada setiap provinsi akan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya investasi pada kawasan ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memfokuskan investasi dan upaya pembangunan berdasarkan pada subsektor kunci atau sektor unggulan pada setiap provinsi, karena apabila terjadi peningkatan 1 unit output pada sektor kunci, maka akan berdampak pada peningkatan 1 unit output pada subsektor lain.